

# PANDANGAN UNTUK RANPERDA KOTA MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NAMA : Ir. EDDY WAHYONO, MM  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SURABAYA, 17 OKTOBER 1963  
ALAMAT : JL. SULFAT INDAH I/37 MALANG  
PEKERJAAN : DIREKTUR UTAMA PT. PANCA KARTIKA JAYA  
PENDIDIKAN TERAKHIR : PASCA SARJANA MANAJEMEN  
ORGANISASI : - KETUA BPC GAPENSI KOTA MALANG  
- KETUA KADIN KOTA MALANG

# REGULASI TERKAIT JASA KONSTRUKSI



REGULASI  
TERKAIT  
JASA  
KONSTRUKSI

1. **UU No. 18/1999** Tentang Jasa Konstruksi
2. **PP No. 28/2000** Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
3. **PP No. 29/2000** Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. **PP No. 30/2000** Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
5. **PP No. 4/2010** Tentang Perubahan Atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
6. **PP No. 59/2010** Tentang Perubahan Atas PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
7. **PP No. 92/2010** Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

# TUJUAN UUK

- Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yg kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
- Mewujudkan penyelenggaraan jakon yg menjamin
  - ▣ Kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban
  - ▣ Dipenuhinya ketentuan yang berlaku
  - ▣ Mewujudkan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi



# PP 28 TAHUN 2000 j.o PP 04 tahun 2010

- Lingkup PP 28 tahun 2000
  1. Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha
  2. Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
  3. Registrasi Badan Usaha
  4. Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
  5. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
  6. Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian Kerja
  7. Klasifikasi , Kualifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja
  8. Forum Jasa Konstruksi
  9. Lembaga Jasa Konstruksi
  10. dll

# PP 29 TAHUN 2000 j.o PP 59 tahun 2010

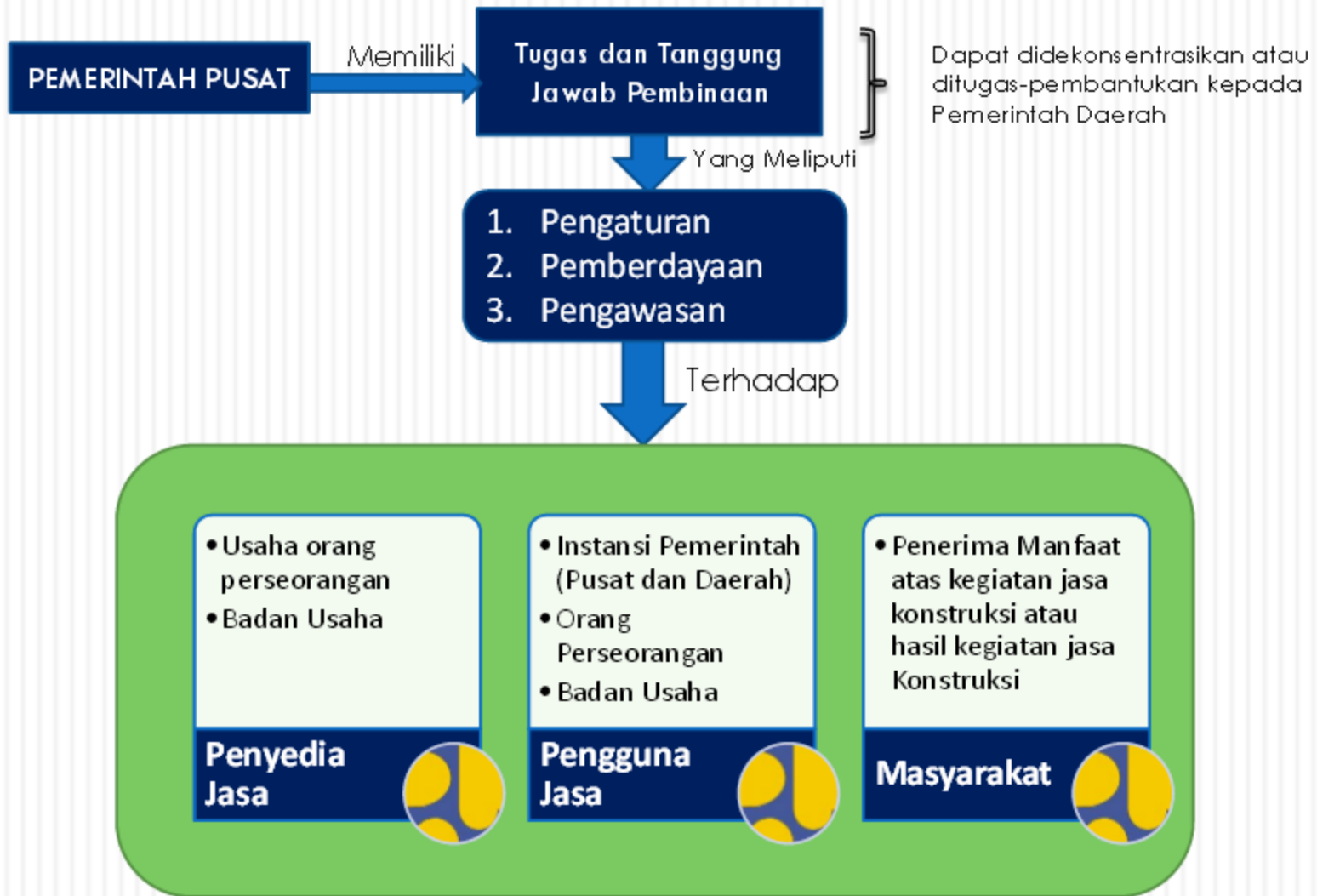
## 1. Pengikatan pekerjaan konstruksi

- Pihak-pihak : pengguna jasa, penyedia jasa
- Pengguna harus membuktikan kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi

Pengikatan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa, penyelenggaraan jakon harus memenuhi :

- Ketentuan keteknikan
- Ketentuan ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan
- Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dlm menjamin tertib penyelenggaraan

# PP NO. 30 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI



# BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI



## BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

### JENIS USAHA

1. Perencanaan
2. Pengawasan
  1. Pengembangan Jenis Usaha:
    1. Umum
    2. Spesialis
3. Pelaksanaan
  1. Pengembangan Jenis Usaha
    1. Umum
    2. Spesialis
    3. Berketrampilan Kerja

### BENTUK USAHA

1. Perorangan → risiko, teknologi, biaya = kecil
2. Badan Usaha

### BIDANG USAHA

1. Bidang Usaha Perencanaan dan Pengawasan
  1. Arsitektur
  2. Rekayasa
  3. Penataan ruang
  4. Jasa konsultan lainnya
2. Bidang Usaha Jasa Pelaksana
  1. Bangunan Gedung
  2. Bangunan Sipil
  3. Instalasi mekanikal dan elektrikal
  4. Jasa Pelaksanaan lainnya

# SYARAT USAHA JASA KONSTRUKSI

PERSYARATAN	JENIS			
	BU NASIONAL	BU ASING	USAHA PERSEORANGAN	
			USAHA KETEKNIKAN	USAHA KEAHLIAN
IZIN USAHA	√	√		
SERTIFIKAT BADAN USAHA	√	√		
SERTIFIKAT KEAHLIAN				√
SERTIFIKAT KETERAMPILAN			√	

## PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI :

1. **PERMEN PU NO. 04 tahun 2011** tentang Pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional
2. **PERMEN PU NO. 05 tahun 2011** tentang Pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing



## SYARAT MINIMAL PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Syarat minimal yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha untuk dapat mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi adalah :

1. Sertifikat Badan Usaha
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Sertifikat Ketrampilan atau Keahlian bagi usaha orang perseorangan

**NB:**

1. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan badan usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tertera dalam SBU dan IUJK
2. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan perseorangan konstruksi harus sesuai dengan bidang keahlian sebagaimana tertera dalam SKA/SKT

## JENIS-JENIS IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

### Perusahaan Nasional

Izin Usaha Jasa  
Konstruksi Nasional  
(IUJKN) &  
Tanda Daftar Usaha  
Orang Perseorangan

Diterbitkan  
oleh

Pemerintah  
Kabupaten/Kota

UU 18/1999  
PP 28/2000  
PP 30/2000  
PP 41/2000  
Perm enpu 04/2011

### Perusahaan Asing

Izin Usaha Perwakilan  
Badan Usaha Jasa  
Konstruksi Asing  
(IPBUJKA)

Diterbitkan  
oleh

Kementerian  
Pekerjaan  
Umum

UU 18/1999  
PP 28/2000  
PP 30/2000  
Perm enpu 05/2011

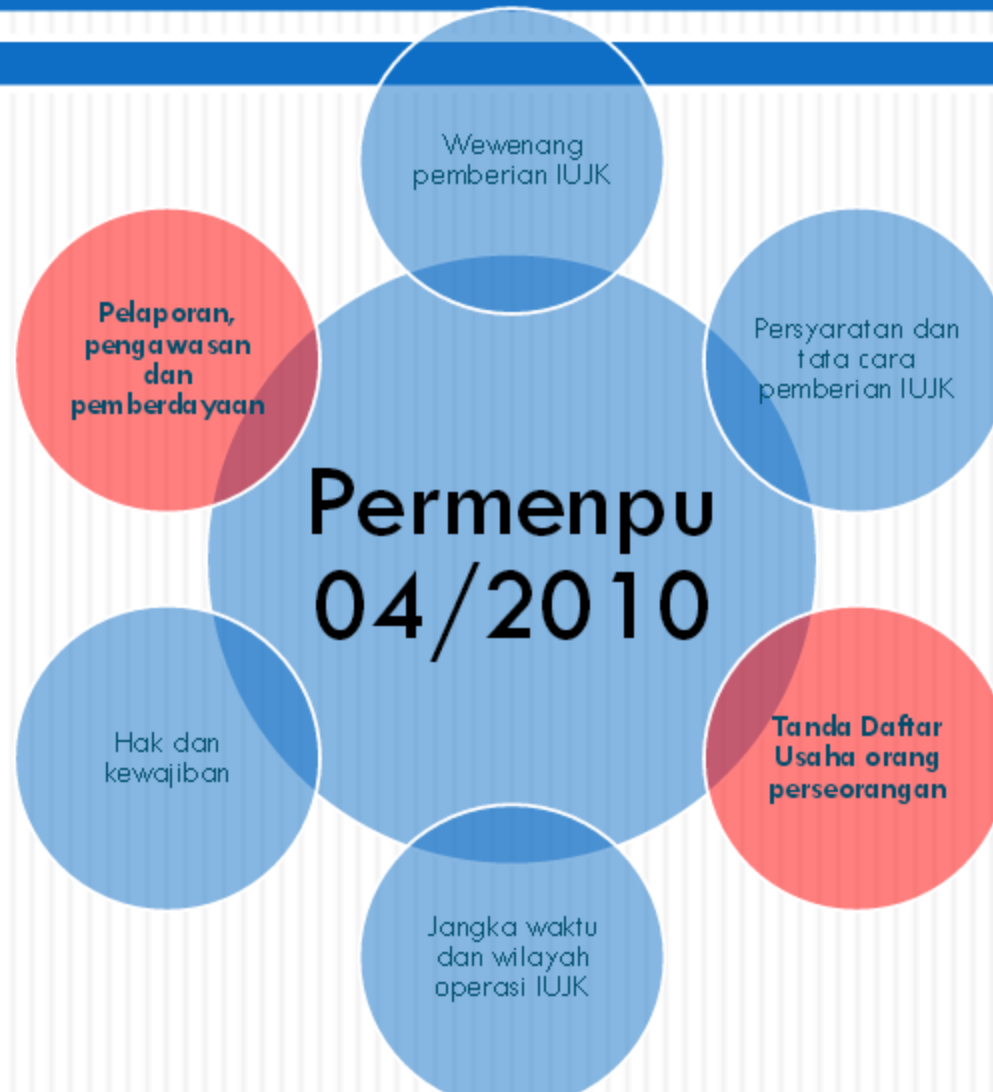
Izin Usaha Jasa  
Konstruksi Perusahaan  
Penanaman Modal  
Asing (IUJKPMA)

Diterbitkan  
oleh

Badan  
Koordinasi  
Penanaman  
Modal (BKPM)

UU 18/1999  
PP 28/2000  
PP 30/2000  
Perm enpu 24/2009

# LINGKUP PERATURAN



# PERMOHONAN IUJK

BUJK mengajukan permohonan

permohonan izin baru

perpanjangan izin

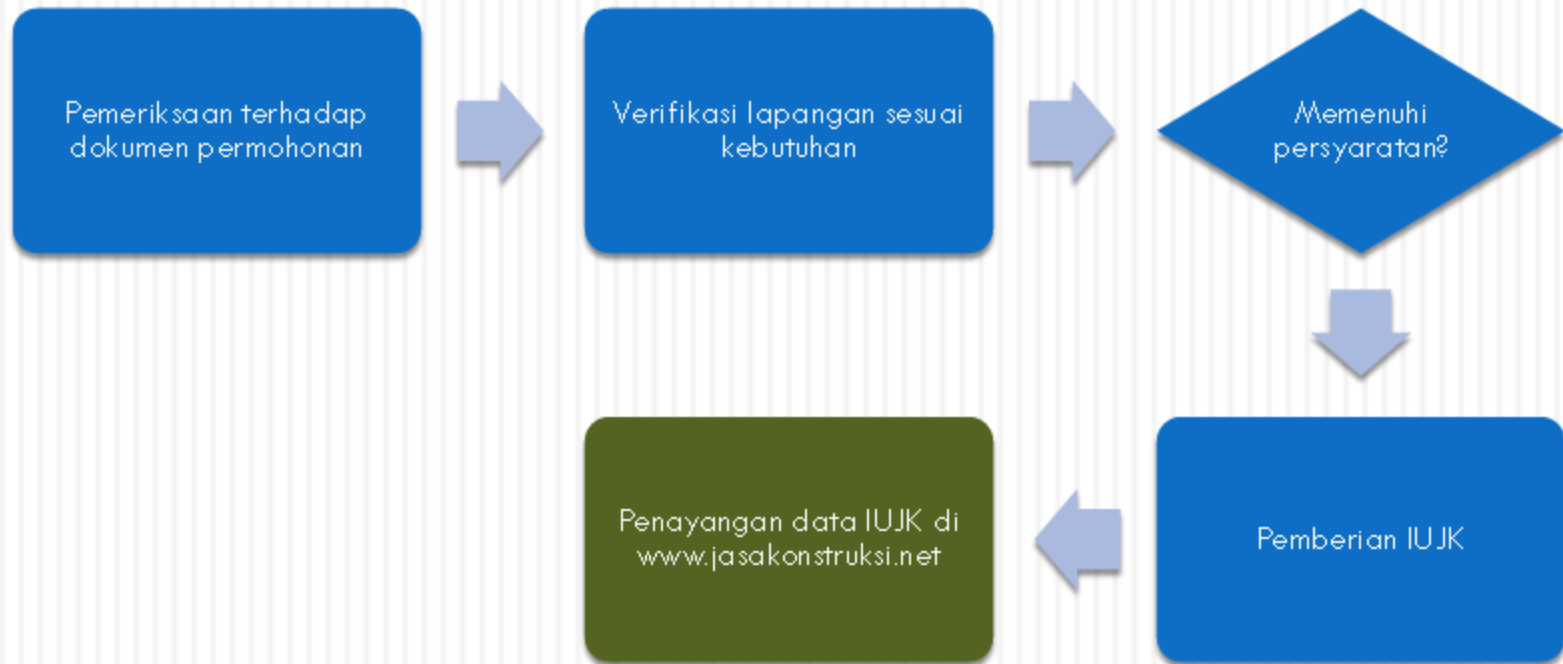
perubahan data

penutupan izin

Kepada Instansi/Unit Kerja yang ditunjuk Bupati/Walikota



## Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Teknis)



# Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Non Teknis)

